

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala petunjuk-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022.

Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, sekaligus sebagai salah satu indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang dilandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta seluruh stakeholder sebagai alat ukur dan indikator pelaksanaan program pembangunan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2022 ini merupakan aktualisasi dari pelaksanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai acuan dan panduan pelaksanaan program-program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Diharapkan Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2022 ini dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dari Program, Kegiatan dan Anggaran yang telah direalisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
1.5 Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan	11
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2022	13
2.3. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	19
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	20
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	22
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	23
3.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	23
3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	25
3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	26
3.8 Perbandingan Data Kinerja	29
3.9 Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja.....	33
4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja	33
4.3 Strategi Pemecahan Masalah.....	34

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja kepada publik dan sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. LKIP disusun melalui pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022 dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam hasil Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Total Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar **Rp.16.056.099.640,-** dengan realisasi sebesar **Rp14.906.104.602** atau (92,84%).

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi	
1	Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Partai Politik (11), Organisasi kemasyarakatan (20), forum pembaruan kebangsaan (10), Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (100) sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. Total Lembaga : 141	85,1% (120 Lembaga)	150 Lembaga	106,38	Target Tercapai
2	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik (11) dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (298) yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik. Total Lembaga : 309	90,6% (278 Lembaga)	281 Lembaga	101	Target Tercapai
3	Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49). Total Lembaga : 49	65,3% (32 ormas)	27 Ormas	84,3	Target Tidak Tercapai
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.(2 laporan)	100%	2 Dokumen	100	Target Tercapai
5	Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun. (2 Laporan)	100%	2 Laporan	100	Target Tercapai

Dari 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2022 terbagi kedalam 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja rata-rata kegiatan mencapai 98,32% dan anggaran keuangan mencapai 92.84%

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk memiliki SAKIP yang merupakan suatu rangkaian sistematis yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban institusi atau organisasi melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta penggunaan anggarannya.

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor :DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah atas pencapaian perencanaan kinerja target Penetapan Kinerja Tahun 2022.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun selanjutnya.

C. GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) sub bagian dan 2 (dua) orang Sub koordinator substansi, Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Sub koordinator substansi, seperti uraian sebagai berikut :

1) Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Sub koordinator substansi program, data dan evaluasi;
- Sub koordinator substansi keuangan;

2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :

- Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan.
- Sub koordinator substansi bela negara dan karakter bangsa

3) Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :

- Sub koordinator substansi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
- Sub koordinator substansi Penanganan Konflik.

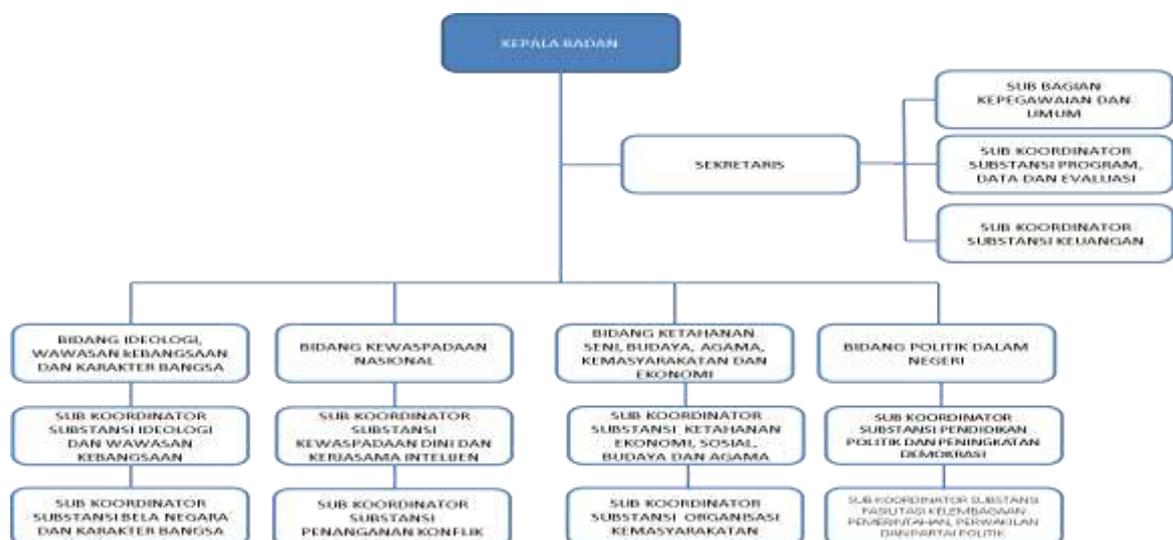
4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas :

- Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- Sub koordinator substansi organisasi kemasyarakatan.

5) Bidang Politik Dalam Negri, terdiri atas :

- Sub koordinator substansi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi.
- Sub koordinator substansi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Bagan struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT



3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 sebanyak 49 orang, terdiri dari :

a. PNS sebanyak 41 orang dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan : 1 orang.
- 2) Sekretaris : 1 orang.
- 3) Kepala Bidang : 4 orang.
- 4) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum : 1 orang.
- 5) Sub koordinator substansi Keuangan : 1 orang.
- 6) Sub koordinator substansi program, data dan evaluasi : 1 orang.
- 7) Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan: 1 orang.
- 8) Sub koordinator substansi bela negara dan karakter bangsa: 1 orang.
- 9) Sub koordinator substansi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi: 1 orang.
- 10) Sub koordinator substansi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik : 1 orang.
- 11) Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama : 1 orang.
- 12) Sub koordinator substansi organisasi kemasyarakatan : 1 orang.
- 13) Sub koordinator substansi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen : 1 orang.
- 14) Sub koordinator substansi penanganan konflik : 0 orang
- 15) Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : 1 orang.
- 16) Fungsional arsiparis dan tertentu : 1 orang
- 17) Staf pelaksana : 25 orang

b. Pegawai tidak tetap/tenaga kontrak sebanyak 8 orang :

- 1) Operator komputer : 2 orang
- 2) Tenaga pengemudi : 2 orang
- 3) Tenaga kebersihan : 2 orang
- 4) Tenaga Keamanan : 2 orang

4. Sarana dan Prasarana Kantor

Berikut disajikan sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kendaraan roda 4 : 2 buah
- 2) Tenis Meja : 1 buah
- 3) Papan Nama Kantor : 1 buah
- 4) Printer : 20 buah

5)	Komputer PC/CPU	: 25 buah
6)	Meja Kerja	: 67 buah
8)	Handycam	: 1 unit
9)	LCD Proyektor	: 1 unit
10)	Wirrales	: 1 unit
11)	Sound System	: 1 set
12)	UPS Stabiliser	: 15 buah
13)	Router Modem Wifi	: 3 unit
14)	Tanah Bangunan	: 4 bidang (pindah kantor)
16)	Laptop	: 3 unit
17)	Kursi Tamu/ Sofa	: 5 set
18)	Kain Gorden	: 65 lembar
19)	Lemari Arsip 2 pintu	: 22 buah
20)	Berangkas Besi	: -
21)	Rumah Dinas	: 4 unit
22)	Kursi Rapat	: 84 buah
23)	Kulkas 1 pintu	: 1 buah
24)	Dispenser dan Galon	: 3 buah
25)	Rak Besi	: 4 buah

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2022.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3. Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- 3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 3.8 Perbandingan Data Kinerja
- 3.9 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja
- 4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2019-2023 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi NTT dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

1. VISI

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 yaitu **“Meningkatkan pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing & Tenaga Kerja Asing di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di pintu masuk perbatasan dan destinasi pariwisata”**.

Berdasarkan pada Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai berikut : **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ”**.

Untuk memberikan pemahaman tentang maksud nilai-nilai dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut :

Masyarakat yang cerdas berdemokrasi, artinya bahwa melalui visi ini seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggungjawab sehingga tercipta pemerintahan yang terlegitimasi.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 untuk mendukung pencapaian Visi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Strategis Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik	❖ Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
	❖ Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Pembinaan dan penguatan terhadap Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
	❖ Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Pengendalian, pendataan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	❖ Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pengendalian dan Pembinaan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya
	❖ Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol memiliki 5 (lima) Program dengan masing-masing memiliki target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.795.869.060,
1.	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.973.273.880
2.	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik.	2.970.773.000
3.	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	117.963.200
4.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	320.624.300
5.	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	4.877.596.200

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk Target kinerja tahun 2022 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel Target Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran		2022
			Target
1	Cakupan partai politik, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan forum pembaruan kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan (141 Lembaga).	Jumlah Partai Politik (11), Organisasi Kemasyarakatan (20) Forum Pembaruan Kebangsaan (10) dan Lembaga Pendidikan (100) yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).	85,1% (120 Lembaga)
2	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	Jumlah Partai Politik (11) dan Lembaga Pendidikan (298) yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	90,6% (278 Lembaga)
3	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).	Jumlah Organisasi Masyarakat	65,3% (32 ormas)
4	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan	100%
5	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun.	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%

C. PERJANJIAN KINERJA.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tersebut di buat dalam Perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut: Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2022 adalah Rp. **16,056,099,640,-** yang dipaparkan dalam bab III dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja selama tahun 2022. Seperti Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).	70,2	85,1	Jumlah Papol, Ormas, FPK, <u>Lembaga Pendidikan</u> x 100 Jumlah Target Lembaga
2	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	80,3	90,6	Jumlah Partai Politik, <u>Lembaga Pendidikan</u> x 100 Jumlah Target Lembaga
3	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi.	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).	34,7	65,3	<u>Jumlah Ormas</u> x 100 Jumlah Target Lembaga
4	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya. (2 Laporan)	100	100	<u>Jumlah Laporan</u> x 100 Jumlah Target Laporan
5	Terlaksananya Peningkatan penanganan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun. (2 Laporan)	100	100	<u>Jumlah Laporan</u> x 100 Jumlah Target Laporan

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 16.896.464.534	Realisasi minimal 85 %
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6.879.142.684	Realisasi minimal 90 %
2.	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 773.860.050	Realisasi minimal 85 %
3.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 140.234.700	Realisasi minimal 85%
4.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Dan Budaya	Rp. 351.291.700	Realisasi minimal 85 %
5.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.018.570.000	Realisasi minimal 85 %
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 5.733.365.400	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	Rp. 12.000.000	Realisasi minimal 90%
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Rp. -	-
	1. -	-	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

- C. **Penyampaian dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tanggal 31 Maret 2022 (dikecualikan kontrak tahun jamak).**
- D. **Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022..**
- E. **Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80) F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90).**
- F. **Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%.**
- G. **Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:**
 - 1. TL temuan di bawah tahun 2020; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 75 %
 - 2. TL temuan di atas tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100 %

- I. **Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001: 2015.**
- J. **Jumlah Inovasi Minimal 5 (lima) jenis.**
- K. **Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-NADI paling lambat Tanggal 1 Maret 2022.**
- L. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30) .**
- M. **Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75)**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2022 merupakan tolak ukur keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Perbandingan ini sesuai dengan tabel berikut :

Tabel A.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/REALISASI KINERJA		Keterangan Realisasi Target
			TARGET 2022	REALISASI 2022	
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	85,1% atau 120 lembaga	166.7 %	Meningkatnya pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi partai politik (11), Organisasi Kemasyarakatan (6), Forum Pembaruan Kebangsaan (28) dan Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ sederajat (155) = 200 lembaga
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan an Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	90,6 % atau 280 lembaga	101%	Meningkatnya Pendidikan politik dan Pembinaan bagi partai politik (11) dan Lembaga Pendidikan tingkat SMA/Sederajat (272)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/REALISASI KINERJA		Keterangan Realisasi Target
			TARGET 2022	REALISASI 2022	
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemsayarakatan	65,3 %	86%	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemsayarakatan
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemsayarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	Meningkatnya ketahanan organisasi kemsayarakatan terhadap ekonomi sosial dan Buday
5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100%	100%	Meningkatnya pemantapan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen dan pemantuan orang asing

Kesimpulan Tidak tercapainya pencapai target pada peningkatan jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi : 86 %. Sedangkan pencapaian target pada sasaran strategis pada 4 sasaran strategis yaitu :

- 1) Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan : 166.7 %
- 2) Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur : 101 %
- 3) Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya : 100 %.
- 4) Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun : 100 %.

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu .

Perbandingan ini sesuai dengan tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Perbandingan Realisasi Target	
			2021	2022		2021	2022
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	38.38	166.7	partai politik	11	11
					Ormas		6
					FPK	21	28
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ sederajat :	9	155
					Jumlah	38	200
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik & Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	50,4	101	partai politik	11	11
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA / Sederajat	114	272
					Jumlah	125	283
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/ 49 lembaga	164.6	86	Organisasi kemasyarakatan	28	28
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyaraktan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100	100	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi sosial dan Budaya	2 Lap	2 Lap
5.	Terlaksananya peningkatan	Cakupan konflik sosial yang	100	100	Meningkatnya pemantapan kewaspadaan	2 Lap	2 laporan

	penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	ditangani setiap tahun			nasional serta penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen & pemantuan orang asing		
--	---	------------------------	--	--	---	--	--

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/REALISASI KINERJA		Target Renstra Jangka Menengah
			TARGET 2022	REALISASI 2022	
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	85,1% atau 120 lembaga	166.7 %	85,1% atau 120 lembaga
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan an Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	90,6 % atau 280 lembaga	101%	90,6 % atau 280 lembaga
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	65,3 %	86%	65,3 %
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyaraktan	100%	100%	100%

	dan budaya	terhadap ekonomi, sosial dan budaya			
5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. menunjukkan bahwa dari 5 (lima) indikator terdapat indikator Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tidak tercapai. Sedangkan 4 indikator lainnya dapat tercapai.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Tidak ada.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Visi Gubernur NTT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

- Analisis penyebab keberhasilan.

- 1) Keberhasilan pada Sasaran strategis Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :166.7%.

Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota di 22 Kabupaten/Kota, serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mengikutsertakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat pada Pelaksanaan Kegiatan : Lomba Pidato, Lomba Vocal Group Lagu-lagu perjuangan, Lomba Menari Tarian Daerah sejak tanggal 30 Maret s/d bulan 31 Mei 2022 . Dan kegiatan Symposium di Kabupaten Ende pada tanggal 31 Mei 2022. Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat : 155. Jumlah FPK : 28 . Jumlah Ormas : 6. Jumlah Partai Politik : 11 . Total : 200 Lembaga.

- 2) Keberhasilan pada Sasaran strategis Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur pada Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat .

Karena anggaran pada DPA Perubahan Badan kesbangpol pada tahun 2022 mengalami redesign sejak bulan april 2022, maka oleh Bidang Politik sebagai pelaksana program melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti dengan KPU dan Bawaslu Tingkat Provinsi NTT, serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Kabupaten/Kota . Untuk mengadakan dan mengikutsertakan dalam kegiatan Pendidikan Politik pada kelompok maupun individu bagi Partai Politik dan bagi Pemilih Pemula atau tingkat Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat , sebagai berikut:

- a) Kota Kupang : Sosialisasi Politik kepada 17 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , SMA Negeri 1 Kota Kupang, SMA Negeri 2 Kota Kupang, SMA Negeri 3 Kota Kupang, SMA Negeri 4 Kota Kupang, SMA Negeri 5 Kota Kupang, SMA Negeri 6 Kota Kupang,, SMA Negeri 7 Kota Kupang, SMA Negeri 8 Kota Kupang, SMA Negeri 9 Kota Kupang, SMA Negeri 10 Kota Kupang, SMA Katolik Giovani Kota Kupang, SMA MAN Kota Kupang, SMAK 1 Kota Kupang, SMA Negeri Fatukoa Kota Kupang, Sma Katholik Sint. Carolus Penfui, SMA Ki Hajar Dewantoro,SMA KRISTEN MERCUSUAR,SMA Kristen 1 Kupang,SMA MUHAMMADIYAH KUPANG,SMA PGRI KUPANG,SMA SEMINARI ST. RAFAEL. Jumlah : 47
 - b) Kabupaten Manggarai: SMA Negeri 1 Cibal, SMA Negeri 2 Cibal, SMA Negeri 3 Cibal: 3 Lembaga. Pada hari Jumat, 21/10/2022 di Manggarai jumlah : 75 peserta
 - c) Kabupaten Sabu Raijua : SMA negeri 1 Sabu barat, SMK Negeri Sabu barat dan SMA PGRI Sabu barat : 3 Lembaga.Jumlah : 50 peserta
 - d) Kabupaten Sumba Tengah : SMA Negri 1 Waibakul, SMA Negri 2 Waibakul, SMAK St. Yohanes Neuman, SMKN 1 Waibakul, SMA Kristen Waibakul : 100 peserta.
 - e) Kabupaten TTS : 11 Pengurus Parpol.
- 3) Keberhasilan pada Sasaran strategis Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya adalah menyelesaikan kegiatan Sosialisasi P4GN dan Hibah kepada FKUB, yang menghasilkan 2 Laporan Hasil kegiatan. Tingkat keberhasilan Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai peserta kegiatan. Dan mengoptimalkan anggaran untuk belanja hibah dilaksanakan tepat waktu. Dimulai dengan meneliti proposal Hibah dari FKUB sampai dengan pencairan anggaran hibah tersebut.

- 4) Keberhasilan pada Sasaran strategis peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun. Adalah menyelesaikan kegiatan pelaporan situasi daerah dari 22 Kabupaten/Kota setiap bulan yang berhubungan dengan pelaporan untuk Forkopimda NTT, Kewaspadaan Nasional di Provinsi NTT, baik itu untuk aktivitas orang asing/lembaga asing dan perbatasan anatar negara. Kebijakan teknis yang menghasilkan Surat Keputusan Gubernur tentang Forkopimda Provinsi NTT, Surat Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Forkopimda Provinsi NTT, Surat Keputusan Gubernur tentang FKDM Tingkat Provinsi NTT.

■ Analisis penyebab kegagalan.

Penyebab kegagalan pada sasaran strategis Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi. Adalah :

- ✓ Redesign Anggaran DPA-P Tahun anggaran 2022. alasan ini mengakibatkan evaluasi pendataan / verifikasi terhadap pemenuhan syarat-syarat bagi ormas yang baru mendaftar menjadi terhambat.
- ✓ Alamat Kantor Badan kesatuan Bangsa dan Politik pindah dari jalan W,J Lalamentik No.100 ke Jalan Basuki Rahmat No.1. . Kurangnya sosialisasi alamat atau tempat yang baru di masyarakat melalui massmedia elektronik atau massmedia cetak.

■ Solusi.

- Diupayakan pada tahun anggaran 2023, Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT akan melakukan sosialisasi tentang alamat atau tempat yang baru di masyarakat melalui massmedia elektronik atau massmedia cetak, untuk meningkatkan sasaran strategis tentang Organisasi masyarakat.
- Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT akan melakukan koordinasi dan kolaborasi terhadap tujuan-tujuan dari Sasaran Strategis dengan Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan dengan instansi-instansi terkait.

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT selama Tahun 2022, yang diuraikan sebagai berikut :

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan perencanaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa seluruh anggaran dicairkan.

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Rapat FPK, Penguatan Karakter Bangsa melalui Lomba Pidato, Lomba Vocal Grup, Lomba Tarian Daerah, Symposium dan Perayaan Hari Lahir Pancasila. Sasaran Strategis ini mencapai 166.7 % Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2022	Realisasi 2022		2022
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	85,1% atau 120 lembaga	166.7	partai politik	11
					Ormas	6
					FPK	28
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA /sederajat:	155
					Jumlah	200

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur. Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan pelaksanaan kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilahan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilahan umum kepala daerah, serta

pemantauan situasi politik di daerah. Sasaran Strategis ini mencapai 101 % Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2022	Realisasi 2022		2022
2	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	90,6 % atau 280 lembaga	101	partai politik	11
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA /Sederajat	272
					Jumlah	283

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Sasaran Strategis ini mencapai 84.3 % Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2022	Realisasi 2022		2022
3	Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/ 49 lembaga	65,3 % atau 32 Ormas	84.3	Ormas	27 Lembaga

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol didukung dengan dengan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah. Sasaran Strategis ini mencapai 100% Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2022	Realisasi 2022		2022
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100%	100	Laporan	2 Laporan

5. Sasaran Strategis : Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pementapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sub kegiatan Penyusunan Program kerja di bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Sasaran Strategis ini mencapai 100% Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2022	Realisasi 2022		2022
5	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100%	100	Laporan	2 Laporan

3.8 Perbandingan Data Kinerja.

Perbandingan data kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Perbandingan Realisasi Target	
			2021	2022		2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	38.38	166.7	partai politik	11	11
					Ormas		6
					FPK	21	28
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ sederajat :	9	155
					Jumlah	38	200
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik & Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	50,4	101	partai politik	11	11
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA /Sederajat	114	272
					Jumlah	125	283
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/ 49 lembaga	164.6	86	Organisasi kemasyarakatan	28	28
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyaraktan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100	100	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi sosial	2 Lap	2 Lap

					dan Budaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100	100	Meningkatnya pemantapan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen & pemantuan orang asing	2 Lap	2 laporan

3.9 Realisasi Anggaran

Berdasarkan perubahan APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, Anggaran Belanja Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 16.056.099.640,- yang terdiri dari 6 program, yang diuraikan sebagai berikut :

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2022		% CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN
			ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	
1	2	3	4	5	6
TOTAL ANGGARAN			16.056.099.640	14.906.104.602	92.8%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.795.869.060	5.158.298.167	89.0%
2.	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.973.273.880	1.913.586.280	97.0%

1	2	3	4	5	6
3.	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik.	2.970.773.000	2.791.490.550	94.0%
4.	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	117.963.200	70.268.300	59.6%
5.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	320.624.300	270.470.000	84.4%
6.	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	4.877.596.200	4.701.991.305	96.2%

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD sebesar Rp. **16.056.099.640,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **14.906.104.602,-** atau sebesar **92.8%** Dan sisa Rp. **1.149.995.038,-**.

Secara lebih terperinci Pagu dan realisasi anggaran dana APBD bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 dijabarkan sebagai berikut :

1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Badan berbagai program/kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar Rp. **16.056.099.640,-** ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **14.906.104.602,-** atau sebesar 91,17 % dan sisa Rp. 728.554.998, adapun besarnya Belanja Operasi terdiri atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.673.489.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.198.277.970,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.198.277.970 .
- Belanja Hibah Rp. 2.926.820.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.926.820.800,- atau sebesar 100 %.

2. BELANJA MODAL

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 257.511.870,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 247.401.405,- atau sebesar 97,47 %. Dan sisa Rp. 10.110.465,-.

BAB IV

PENUTUP

4.KESIMPULAN

Penyajian Laporan Kinerja ini didasarkan pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran realisasi pada Indikator Kinerja Utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 5 (lima) sasaran strategis. Disamping itu penyusunan LKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 5 (Lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Dari 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2022 terbagi kedalam 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 98,32% dengan capaian Kinerja Keuangan 92.8 % dan Kinerja Fisik 100%. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didukung dengan adanya 6 (enam) Program dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 16.056.099.640,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.906.104.602,- atau sebesar 92.8%, sisa anggaran Rp. 1.149.995.038,-.

4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2022 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT meliputi :

1. Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang demikian cepat.
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT melakukan langkah-langkah demi meminimalisir kendala-kendala yang ada, sebagai berikut :

1. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait seperti FKUB, FKDM dan FPK.
3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara instensif dengan seksi-seksi.
4. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan tingkat SMA/ sederajat, partai politik, Organisasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Kepolisian Daerah Provinsi NTT, TNI, Imigrasi, Departemen Agama, Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
6. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik kepada lembaga pendidikan tingkat SMA/ Sederajat, untuk meningkatkan pengetahuan tentang 4 (empat) Konsensus Bangsa, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Yohanes Oktovianus, M.M

Penghulu Utama Madya

NIP. 19661029 119403 1 007